



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian guna mewujudkan Ketahanan Pangan nasional, perlu memberikan subsidi pupuk;
 - b. bahwa untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016, sebagai dasar pengaturan alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi untuk sector pertanian di Kabupaten Banyumas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073)
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembara Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/ 8/ 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.130 /12/2015 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang Beredar di Pasar;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Dinpertenbunhut adalah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas.
4. Dinas Peternakan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinnakkan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas.

5. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas.
6. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Banyumas.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Banyumas.
8. Lurah adalah Lurah dalam wilayah Kabupaten Banyumas.
9. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
10. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
11. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
12. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
13. Kebutuhan pupuk bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per Kecamatan yang dihitung berdasarkan usulan dari Dinpertenbunhut dan Dinnakkan.
14. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/atau kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
15. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
16. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang mengusahakan usaha tani dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
17. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang.



18. Kelompok tani adalah kumpulan petani/petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
19. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
20. Penyalur Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
21. Penyalur Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
22. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompoktani atau penyalur sarana produksi pertanian.
23. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.
24. Direktur Jenderal adalah Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan peraturan perundangan.
25. Penyuluh Lapangan yang selanjutnya disebut Penyuluh adalah penyuluh pertanian dan perikanan lapangan di bawah koordinasi Badan.
26. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

BAB II

JENIS PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
- (2) Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP-36, ZA dan NPK.

BAB III

PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan paling banyak 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan paling banyak 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kecamatan dan alokasi pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2016.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan sebagai :
 - a. Sektor pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - c. Sub Sektor Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X dan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - d. Sub Sektor Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV dan Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - e. Sub Sektor Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX dan Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempertimbangkan rekapitulasi RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Pertanian dan/atau oleh Kepala Badan.

Pasal 6

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, Bupati dapat melakukan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di wilayah masing-masing.

Pasal 7

Dinpertanbunhut, Dinnakkan dan Badan wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan / atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

BAB IV

REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 8

- (1) Dalam hal kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar Kecamatan.
- (2) Realokasi antar kecamatan lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinpertanbunhut Kabupaten Banyumas.
- (3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatuKecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan-bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB V

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke petani, petambak dan/atau kelompok tani melalui Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.



- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh penyalur di Lini IV ke petani, petambak/atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada petani, petambak dan/atau kelompok tani.
 - b. penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi masing-masing wilayah.
 - c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan tepat mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinpertenbunhut, Kepala Dinnakan dan Kepala Badan melakukan pendataan RDKK di wilayah, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani, petambak dan/atau kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani, petambak dan/atau kelompok tani oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP Kabupaten.
- (6) Dinas yang memperoleh alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi penyaluran pupuk bersubsidi, melaporkan hasil verifikasi dan validasi pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Direktur Jenderal.
- (7) Hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan Surat pernyataan tanggungjawab mutlak oleh Kepala Dinas.
- (8) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana pada ayat (6) dilakukan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi tahun 2015 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.



Pasal 10

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, petambak dan/atau kelompok tani di wilayah tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

HARGA ECERAN TERTINGGI DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 11

- (1) Penyaluran di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) HET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - Pupuk Urea = Rp 1.800,- per kg (Seribu delapan ratus rupiah per kilogram)
 - Pupuk SP-36 = Rp 2.000,- per kg (dua ribu rupiah per kilogram)
 - Pupuk ZA = Rp 1.400,- per kg (Seribu empat ratus rupiah per kilogram)
 - Pupuk NPK = Rp 2.300,- per kg (dua ribu tiga ratus rupiah per kilogram)
 - Pupuk Organik = Rp 500,- per kg (limaratus rupiah per kilogram)
- (3) HET sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, petambak dan/atau kelompok tani di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
 - Pupuk Urea = 50 kg (lima puluh kilogram)
 - Pupuk SP-36 = 50 kg (lima puluh kilogram)
 - Pupuk ZA = 50 kg (lima puluh kilogram)
 - Pupuk NPK = 50 kg (lima puluh kilogram)
 - Pupuk Organik = 40 kg (empat puluh kilogram)

Pasal 12

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan:

Pupuk Bersubsidi Pemerintah

Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus pengadaan dan penyaluran pupuk Urea bersubsidi berwarna pink dan pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (orange).

BAB VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku, serta melakukan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani, petambak dan/atau kelompok tani.
- (2) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke petani, petambak dan/atau kelompok tani setiap bulannya kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal.

Pasal 14

- (1) KPPP wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KPPP dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 15

- (1) KPPP wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayahnya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

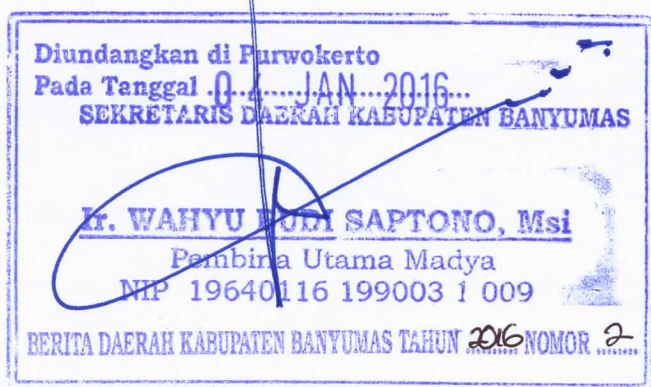
Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

04 JAN 2016

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 2 TAHUN 2016
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

No	KEC	UREA					SP-36					ZA					NPK					ORGANIK				
		TPH	PERKE BUNAN	PETER NAKAN	PER IKANAN	JML	TPH	PERKE BUNAN	PETER NAKAN	PER IKANAN	JML	TPH	PERKE BUNAN	PETER NAKAN	PER IKANAN	JML	TPH	PERKE BUNAN	PETER NAKAN	PER IKANAN	JML	TPH	PERKE BUNAN	PETER NAKAN	PER IKANAN	JML
1	Lumbir	920	82	11	0,00	1.013,00	176	5	0,90	0	181,90	67	0	1,5	0	68,50	214	2	4,50	0	220,50	115	2	0,50	0	117,50
2	Wangon	1.120	180	11	6,21	1.317,21	291	0	1,30	1,02	293,32	125	399	1,4	0,1	525,50	362	39	3,70	0,3	405,00	200	252	0,70	0,61	453,31
3	Jatilawang	1.168	76	13	7,89	1.264,89	138	0	0,90	1,32	140,22	81	0	2,1	0,11	83,21	576	0	3,20	0,39	579,59	313	0	0,50	0,78	314,28
4	Rawalo	1.135	38	13	0,00	1.186,00	267	19	1,30	0	287,30	223	0	1,5	0	224,50	373	6	3,30	0	382,30	201	4	0,60	0	205,60
5	Kebasen	752	164	13	0,40	929,40	132	0	2,80	0,08	134,88	94	0	3,2	0	97,20	199	3	4,30	0	206,30	107	0	0,80	0	107,80
6	Kemranjen	890	153	18	15,57	1.076,57	186	0	1,10	2,56	189,66	120	0	1,2	0,27	121,47	203	199	3,20	0,79	405,99	109	0	0,70	1,56	111,26
7	Sumpiuh	788	198	18	0,14	1.004,14	175	234	0,90	0	409,90	124	38	1,1	0	163,10	499	645	4,20	0	1.148,20	267	0	0,80	0	267,80
11	Tambak	786	228	15	0,00	1.029,00	162	39	1,30	0	202,30	112	0	1,4	0	113,40	889	10	2,90	0	901,90	482	8	1,00	0	491,00
9	Somagede	281	240	18	22,46	561,46	86	0	0,90	3,76	90,66	70	0	1,9	0,36	72,26	129	10	4,10	1,12	144,22	69	0	0,60	2,23	171,83
10	Kalibagor	715	55	13	2,95	785,95	145	310	0,90	0,49	456,39	84	431	1,3	0,05	516,35	199	160	3,60	0,17	362,77	107	80	0,60	0,29	187,89
11	Banyumas	550	197	16	0,00	763,00	111	47	1,20	0	159,20	45	0	1,3	0	46,30	1.068	13	3,80	0	1.084,80	549	14	0,80	0	563,80
12	Patikraja	896	82	15	0,27	993,27	159	0	1,50	0	160,50	56	0	1,6	0	57,60	399	0	4,00	0	403,00	214	2	0,70	0	216,70
13	Purwojati	736	126	10	0,00	872,00	117	0	1,20	0	118,20	37	70	1,6	0	108,60	150	40	3,90	0	193,90	81	0	0,80	0	81,80
14	Ajibarang	942	136	21	2,16	1.101,16	204	64	0,90	0,36	269,26	48	11	1	0	60,00	287	1.115	4,50	0,1	1.406,60	154	0	0,50	0,2	154,70
15	Gumelar	596	237	13	0,14	846,14	120	32	1,60	0	153,60	44	0	3,5	0	47,50	148	58	3,80	0	209,80	81	2	0,70	0	83,70
16	Pekuncen	900	120	19	3,23	1.042,23	194	0	0,90	0,55	195,45	42	0	3	0,04	45,04	189	0	5,50	0,17	194,67	101	0	0,50	0,34	101,84
17	Cilongok	1.189	235	22	0,81	1.446,81	241	0	3,50	0,11	244,61	127	0	3,3	0	130,30	411	0	4,50	0	415,50	255	0	0,80	0,08	255,88
18	Kr. Lewas	416	55	15	56,38	542,38	35	0	0,90	9,45	45,35	36	0	1,1	0,96	38,06	137	0	4,80	2,82	144,62	74	0	0,50	5,66	80,16
19	Kd.banteng	685	82	11	318,59	1.096,59	127	0	1,30	53,17	181,47	56	0	1,7	5,39	63,09	405	0	3,60	15,97	424,57	219	0	0,80	31,92	251,72
20	Baturaden	725	49	10	139,29	923,29	113	0	0,90	23,18	137,08	35	0	1	2,36	38,36	136	0	4,70	7	147,70	74	0	0,60	13,92	88,52
21	Sumbang	1.530	71	21	3,09	1.625,09	250	0	1,70	0,52	252,22	128	0	1,9	0,06	129,96	642	0	3,40	0,18	645,58	345	0	0,80	0,32	346,12
22	Kembaran	1.092	16	13	15,48	1.136,48	173	0	1,10	2,61	176,71	122	0	1,2	0,27	123,47	663	0	3,60	0,78	667,38	356	0	0,50	1,56	358,06
23	Sokaraja	919	20	12	2,80	953,80	119	0	1,00	0,46	120,46	70	351	1,2	0,03	422,23	108	0	2,90	0,13	111,03	58	36	0,20	0,29	94,49
24	Pwt. Selatan	135	0	9	0,00	144,00	33	0	0,00	0	33,00	16	0	0	0	16,00	32	0	0,00	0	32,00	17	0	0,00	0	17,00
25	Pwt. Barat	140	0	0	0,41	140,41	39	0	0,00	0,08	39,08	32	0	0	0	32,00	57	0	0,00	0	57,00	31	0	0,00	0	31,00
26	Pwt. Timur	122	0	0	0,41	122,41	23	0	0,00	0,08	23,08	5	0	0	0	5,00	24	0	0,00	0	24,00	13	0	0,00	0	13,00
27	Pwt. Utara	172	0	0	1,32	173,32	24	0	0,00	0,2	24,20	1	0	0	0	1,00	16	0	0,00	0,08	16,08	8	0	0,00	0,24	8,24
	Jumlah	20.300	2.840	350	600,00	24.090	3.840	750	30,00	100,00	4.720	2.000	1.300	40	10,00	3.350	8.515	2.300	90,00	30,00	10.935,00	4.600	400	15,00	60,00	5.075

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR **2** TAHUN 2016
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
 DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

															(ton)
No	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sep	Okt	Nop	Des	Jumlah	
1	Lumbir	149	117	88	142	105	18	41	76	48	26	45	65	920	
2	Wangon	278	113	165	72	124	98	58	30	72	39	46	25	1.120	
3	Jatilawang	192	129	148	87	184	88	47	93	68	34	63	33	1.168	
4	Rawalo	173	160	79	136	140	93	45	93	65	35	77	38	1.135	
5	Kebasen	61	99	133	58	104	87	7	39	21	26	81	40	752	
6	Kemranjen	150	57	102	36	55	116	94	120	63	32	63	2	890	
7	Sumpiuh	160	68	121	28	42	79	77	83	41	17	57	15	788	
8	Tambak	140	58	133	43	101	106	83	44	18	20	22	18	786	
9	Somagede	65	24	56	47	45	14	0	0	16	15	0	0	281	
10	Kalibagor	60	69	117	78	99	74	32	41	35	34	77	0	715	
11	Banyumas	45	47	128	27	85	60	34	18	34	21	9	40	550	
12	Patikraja	150	26	111	69	99	94	69	90	32	4	75	76	896	
13	Purwojati	100	103	41	106	45	36	184	46	30	25	11	9	736	
14	Ajibarang	130	97	128	73	122	94	26	77	45	57	21	71	942	
15	Gumelar	100	47	124	89	96	0	13	17	30	33	37	10	596	
16	Pekuncen	96	81	86	73	86	73	60	60	60	51	94	81	900	
17	Cilongok	180	74	157	69	162	154	66	87	86	87	61	9	1.189	
18	Karanglewas	50	39	26	15	57	39	42	23	29	23	33	40	416	
19	Kedungbanteng	86	68	73	45	63	38	75	28	51	50	57	52	685	
20	Baturraden	86	73	78	47	57	56	63	53	67	31	55	61	725	
21	Sumbang	140	105	157	141	170	154	150	149	116	87	105	56	1.530	
22	Kembaran	118	80	146	93	96	99	87	85	83	62	75	69	1.092	
23	Sokaraja	150	100	140	17	181	109	58	17	17	56	57	17	919	
24	Purwokerto Selatan	15	36	9	15	11	2	9	7	5	5	16	5	135	
25	Purwokerto Barat	25	14	12	10	11	13	11	11	12	5	7	9	140	
26	Purwokerto Timur	18	10	14	9	8	13	14	9	10	5	7	5	122	
27	Purwokerto Utara	40	12	13	13	15	20	13	15	10	7	5	9	172	
	Jumlah	2.957	1.904	2.584	1.640	2.360	1.825	1.457	1.411	1.164	885	1.255	857	20.300	

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR **2** TAHUN 2016
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
 DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

No	Kecamatan	(ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Lumbir	38	8	11	15	28	10	18	6	6	19	6	11	176
2	Wangon	83	15	13	12	60	34	26	8	12	14	5	9	291
3	Jatilawang	37	3	7	12	20	8	13	0	5	18	5	10	138
4	Rawalo	67	25	10	38	39	15	20	7	7	26	4	8	267
5	Kebasen	21	10	9	19	20	6	17	4	4	7	4	11	132
6	Kemranjen	19	14	16	11	33	36	17	1	1	20	4	13	186
7	Sumpiuh	35	16	20	6	11	24	24	4	6	13	5	12	175
8	Tambak	21	15	22	9	26	27	28	3	0	6	2	4	162
9	Somagede	12	4	13	0	14	9	10	1	0	7	6	10	86
10	Kalibagor	18	6	16	16	27	14	20	4	4	6	4	10	145
11	Banyumas	8	4	12	9	15	4	16	4	3	23	7	7	111
12	Patikraja	11	4	0	0	23	40	28	7	15	15	7	9	159
13	Purwojati	11	4	7	32	16	0	10	0	1	24	4	8	117
14	Ajibarang	19	7	4	22	17	43	26	11	15	23	11	6	204
15	Gumelar	9	0	0	1	6	1	12	2	3	67	5	16	120
16	Pekuncen	15	45	7	8	13	21	29	5	5	41	1	2	194
17	Cilongok	19	54	21	8	36	62	39	0	0	3	0	0	241
18	Karanglewas	0	0	0	0	0	0	16	4	4	4	4	4	35
19	Kedungbanteng	16	26	1	3	7	6	22	11	11	12	5	7	127
20	Baturraden	12	7	8	4	0	6	28	15	11	11	4	7	113
21	Sumbang	25	25	2	8	41	24	43	19	19	27	7	11	250
22	Kembaran	22	22	11	14	7	4	35	15	15	15	4	10	173
23	Sokaraja	15	0	4	0	7	10	21	15	15	15	4	13	119
24	Purwokerto Selatan	3	6	4	0	1	0	4	1	3	4	4	4	33
25	Purwokerto Barat	6	2	0	3	5	0	4	4	4	5	4	4	39
26	Purwokerto Timur	1	3	0	0	2	0	2	1	0	8	2	3	23
27	Purwokerto Utara	3	0	0	0	0	0	5	3	0	8	1	2	22
	Jumlah	545	323	218	248	474	404	533	157	167	439	120	211	3.840

BUPATI BANYUMAS,




ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 2 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN
 DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

No	Kecamatan	(ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Lumbir	0	0	0	0	17	17	16	0	0	0	16	16	82
2	Wangon	0	0	0	0	36	36	36	0	0	0	36	36	180
3	Jatilawang	0	0	0	0	16	15	15	0	0	0	15	15	76
4	Rawalo	0	0	0	0	8	8	8	0	0	0	7	7	38
5	Kebasen	0	0	0	0	33	33	33	0	0	0	33	32	164
6	Kemranjen	0	0	0	0	31	31	31	0	0	0	30	30	153
7	Sumpiuh	0	0	0	0	40	40	40	0	0	0	39	39	198
8	Tambak	0	0	0	0	46	46	46	0	0	0	45	45	228
9	Somagede	0	0	0	0	48	48	48	0	0	0	48	48	240
10	Kalibagor	0	0	0	0	11	11	11	0	0	0	11	11	55
11	Banyumas	0	0	0	0	40	40	39	0	0	0	39	39	197
12	Patikraja	0	0	0	0	17	17	16	0	0	0	16	16	82
13	Purwojati	0	0	0	0	26	25	25	0	0	0	25	25	126
14	Ajibarang	0	0	0	0	28	27	27	0	0	0	27	27	136
15	Gumelar	0	0	0	0	50	49	49	0	0	0	49	40	237
16	Pekuncen	0	0	0	0	24	24	24	0	0	0	24	24	120
17	Cilongok	0	0	0	0	47	47	47	0	0	0	47	47	235
18	Karanglewas	0	0	0	0	11	11	11	0	0	0	11	11	55
19	Kedungbanteng	0	0	0	0	17	17	16	0	0	0	16	16	82
20	Baturraden	0	0	0	0	10	10	10	0	0	0	10	9	49
21	Sumbang	0	0	0	0	15	14	14	0	0	0	14	14	71
22	Kembaran	0	0	0	0	4	3	3	0	0	0	3	3	16
23	Sokaraja	0	0	0	9	2	2	2	0	0	0	2	2	20
24	Purwokerto Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Purwokerto Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Purwokerto Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Purwokerto Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	9	577	571	567	0	0	0	563	552	2.840

BUPATI BANYUMAS,


 ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR **2** TAHUN 2016
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN
 DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

														(ton)
No	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sep	Okt	Nop	Des	Jumlah
1	Lumbir	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
2	Wangon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Jatilawang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rawalo	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	19
5	Kebasen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kemranjen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sumpiuh	0	0	0	0	0	0	79	0	0	62	94	0	235
8	Tambak	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	39
9	Somagede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kalibagor	0	0	0	215	28	0	0	0	0	37	17	13	310
11	Banyumas	0	0	0	14	4	0	0	0	0	17	12	0	47
12	Patikraja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Purwojati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ajibarang	0	0	0	54	5	0	0	0	0	0	5	0	64
15	Gumelar	0	0	0	8	0	0	0	0	0	19	5	0	32
16	Pekuncen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Cilongok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Karanglewas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kedungbanteng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Baturraden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Sumbang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kembaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Sokaraja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Purwokerto Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Purwokerto Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Purwokerto Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Purwokerto Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0	354	37	0	79	0	0	135	132	13	750

BUPATI BANYUMAS,

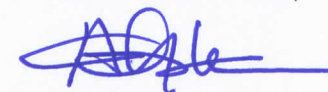
ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR **2** TAHUN 2016
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN
 DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

No	Kecamatan	(ton)												Jumlah	
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sep	Okt	Nop	Des		
1	Lumbir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wangon	0	0	0	122	84	18	0	0	0	122	20	33	399	
3	Jatilawang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Rawalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Kebasen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kemranjen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Sumpiuh	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	38	
8	Tambak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Somagede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Kalibagor	0	0	0	59	221	0	0	0	0	97	25	29	431	
11	Banyumas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Patikraja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Purwojati	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	70	
14	Ajibarang	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	11	
15	Gumelar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Pekuncen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Cilongok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Karanglewas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Kedungbanteng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Baturraden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Sumbang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Kembaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Sokaraja	0	0	0	88	87	0	0	0	0	88	88	0	351	
24	Purwokerto Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Purwokerto Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Purwokerto Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Purwokerto Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah	0	0	0	378	397	18	0	0	0	307	138	62	1.300	

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR **2** TAHUN 2016
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN
 DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

No	Kecamatan	(ton)												Jumlah	
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sep	Okt	Nop	Des		
1	Lumbir	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2	Wangon	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39
3	Jatilawang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rawalo	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
5	Kebasen	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3
6	Kemranjen	0	0	0	18	105	26	25	0	0	0	6	20	0	199
7	Sumpiuh	0	0	0	321	324	0	0	0	0	0	0	0	0	645
8	Tambak	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	10
9	Somagede	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	6	0	10
10	Kalibagor	0	0	0	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	160
11	Banyumas	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	3	5	0	13
12	Patikraja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Purwojati	0	0	0	6	12	7	3	0	0	0	7	5	0	40
14	Ajibarang	0	0	0	14	0	651	0	0	0	0	0	450	0	1.115
15	Gumelar	0	0	0	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	58
16	Pekuncen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Cilongok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Karanglewas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kedungbanteng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Baturraden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Sumbang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kembaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Sokaraja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Purwokerto Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Purwokerto Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Purwokerto Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Purwokerto Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0	521	560	685	28	0	0	0	18	488	0	2.300

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR **2** TAHUN 2016
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN
 DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

														(ton)
No	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sep	Okt	Nop	Des	Jumlah
1	Lumbir	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
2	Wangon	0	0	0	46	35	9	25	48	0	46	35	9	253
3	Jatilawang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rawalo	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
5	Kebasen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kemranjen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sumpiuh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Tambak	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
9	Somagede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kalibagor	0	0	0	27	45	0	0	0	0	8	0	0	80
11	Banyumas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	14
12	Patikraja	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
13	Purwojati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ajibarang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Gumelar	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
16	Pekuncen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Cilongok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Karanglewas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kedungbanteng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Baturraden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Sumbang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kembaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Sokaraja	0	0	0	18	0	0	0	0	0	18	0	0	36
24	Purwokerto Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Purwokerto Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Purwokerto Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Purwokerto Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	8	0	0	97	82	9	25	48	2	72	49	9	400

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN XII
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR **2** TAHUN 2016
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

(ton)

No	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sep	Okt	Nop	Des	Jumlah
1	Lumbir	1	2	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	11
2	Wangon	1	1	1	2	1	1	0	0	1	1	1	1	11
3	Jatilawang	1	1	2	1	1	1	0	0	1	1	2	2	13
4	Rawalo	2	1	2	1	1	1	0	0	1	1	2	1	13
5	Kebasen	1	1	1	1	1	1	0	0	2	1	2	2	13
6	Kemranjen	2	2	2	2	1	1	0	0	1	3	2	2	18
7	Sumpiuh	2	2	2	2	2	1	0	0	2	2	1	2	18
8	Tambak	1	1	2	2	1	1	0	0	1	2	2	2	15
9	Somagede	2	2	2	2	1	1	0	0	2	2	2	2	18
10	Kalibagor	1	2	2	1	1	1	0	0	1	2	1	1	13
11	Banyumas	1	2	1	1	1	1	0	0	1	2	3	3	16
12	Patikraja	2	2	2	2	1	1	0	0	1	1	2	1	15
13	Purwojati	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	10
14	Ajibarang	2	3	2	3	2	1	0	0	1	2	2	3	21
15	Gumelar	2	1	1	2	2	1	0	0	1	1	1	1	13
16	Pekuncen	2	2	1	3	2	1	0	0	1	2	3	2	19
17	Cilongok	3	2	2	3	2	1	0	0	2	2	3	2	22
18	Karanglewas	1	2	2	2	1	1	0	0	1	2	2	1	15
19	Kedungbanteng	1	2	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	11
20	Baturraden	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	10
21	Sumbang	2	1	3	2	2	1	0	0	2	3	3	2	21
22	Kembaran	1	1	2	2	1	1	0	0	2	1	1	1	13
23	Sokaraja	1	1	1	1	2	1	0	0	1	2	2	1	13
24	PWT Selatan	1	1	1	-	1	1	0	0	1	1	1	1	9
25	PWT Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	PWT Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	PWT Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	35	37	38	39	31	24	0	0	30	38	42	37	351

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR **2** TAHUN 2016
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

No	Kecamatan	(ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Lumbir	0,10	0,10	0,20	0,20	0	0	0	0	0	0	0,10	0,20	0,90
2	Wangon	0,20	0,50	0,10	0,20	0	0	0	0	0	0	0,20	0,10	1,30
3	Jatilawang	0,10	0,10	0,20	0,20	0	0	0	0	0	0	0,10	0,20	0,90
4	Rawalo	0,10	0,20	0,30	0,20	0	0	0	0	0	0	0,30	0,20	1,30
5	Kebasen	0,30	1,00	0,50	0,30	0	0	0	0	0	0	0,40	0,30	2,80
6	Kemranjen	0,20	0,20	0,10	0,20	0	0	0	0	0	0	0,20	0,20	1,10
7	Sumpiuh	0,30	0,20	0,10	0,10	0	0	0	0	0	0	0,10	0,10	0,90
8	Tambak	0,30	0,20	0,10	0,10	0	0	0	0	0	0	0,30	0,30	1,30
9	Somagede	0,10	0,10	0,20	0,20	0	0	0	0	0	0	0,10	0,20	0,90
10	Kalibagor	0,10	0,20	0,10	0,20	0	0	0	0	0	0	0,20	0,10	0,90
11	Banyumas	0,30	0,20	0,20	0,10	0	0	0	0	0	0	0,20	0,20	1,20
12	Patikraja	0,30	0,20	0,10	0,30	0	0	0	0	0	0	0,30	0,30	1,50
13	Purwojati	0,20	0,30	0,20	0,10	0	0	0	0	0	0	0,20	0,20	1,20
14	Ajibarang	0,10	0,10	0,20	0,20	0	0	0	0	0	0	0,10	0,20	0,90
15	Gumelar	0,20	0,20	0,50	0,10	0	0	0	0	0	0	0,50	0,10	1,60
16	Pekuncen	0,10	0,10	0,20	0,20	0	0	0	0	0	0	0,10	0,20	0,90
17	Cilongok	1,00	1,00	0,50	0,40	0	0	0	0	0	0	0,20	0,40	3,50
18	Karanglewas	0,10	0,10	0,20	0,20	0	0	0	0	0	0	0,10	0,20	0,90
19	Kedungbanteng	0,20	0,20	0,30	0,20	0	0	0	0	0	0	0,20	0,20	1,30
20	Baturraden	0,10	0,10	0,20	0,20	0	0	0	0	0	0	0,10	0,20	0,90
21	Sumbang	0,50	0,20	0,20	0,30	0	0	0	0	0	0	0,20	0,30	1,70
22	Kembaran	0,10	0,20	0,10	0,20	0	0	0	0	0	0	0,20	0,30	1,10
23	Sokaraja	0,10	0,20	0,20	0,20	0	0	0	0	0	0	0,20	0,10	1,00
24	PWT Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	PWT Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	PWT Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	PWT Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	5,10	5,90	5,00	4,60	0	0	0	0	0	0	4,60	4,80	30,00

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 2 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

KEBUTUHAN PUPUK Z A BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

No	Kecamatan	(Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Lumbir	0,50	0,10	0,20	0,20	0	0	0	0	0	0,20	0,10	0,20	1,50
2	Wangon	0,20	0,50	0,10	0,20	0	0	0	0	0	0,10	0,20	0,10	1,40
3	Jatilawang	1,00	0,10	0,20	0,20	0	0	0	0	0	0,30	0,10	0,20	2,10
4	Rawalo	0,10	0,20	0,30	0,20	0	0	0	0	0	0,20	0,30	0,20	1,50
5	Kebasen	0,50	1,00	0,50	0,30	0	0	0	0	0	0,20	0,40	0,30	3,20
6	Kemranjen	0,20	0,20	0,10	0,20	0	0	0	0	0	0,10	0,20	0,20	1,20
7	Sumpiuh	0,30	0,20	0,10	0,10	0	0	0	0	0	0,20	0,10	0,10	1,10
8	Tambak	0,30	0,20	0,10	0,10	0	0	0	0	0	0,10	0,30	0,30	1,40
9	Somagede	1,00	0,10	0,20	0,20	0	0	0	0	0	0,10	0,10	0,20	1,90
10	Kalibagor	0,10	0,20	0,10	0,20	0	0	0	0	0	0,40	0,20	0,10	1,30
11	Banyumas	0,30	0,20	0,20	0,10	0	0	0	0	0	0,10	0,20	0,20	1,30
12	Patikraja	0,30	0,20	0,10	0,30	0	0	0	0	0	0,10	0,30	0,30	1,60
13	Purwojati	0,50	0,30	0,20	0,10	0	0	0	0	0	0,10	0,20	0,20	1,60
14	Ajibarang	0,10	0,10	0,20	0,20	0	0	0	0	0	0,10	0,10	0,20	1,00
15	Gumelar	2,00	0,20	0,50	0,10	0	0	0	0	0	0,10	0,50	0,10	3,50
16	Pekuncen	2,00	0,10	0,20	0,20	0	0	0	0	0	0,20	0,10	0,20	3,00
17	Cilongok	0,50	1,00	0,50	0,40	0	0	0	0	0	0,30	0,20	0,40	3,30
18	Karanglewas	0,10	0,10	0,20	0,20	0	0	0	0	0	0,20	0,10	0,20	1,10
19	Kedungbanteng	0,50	0,20	0,30	0,20	0	0	0	0	0	0,10	0,20	0,20	1,70
20	Baturraden	0,10	0,10	0,20	0,20	0	0	0	0	0	0,10	0,10	0,20	1,00
21	Sumbang	0,50	0,20	0,20	0,30	0	0	0	0	0	0,20	0,20	0,30	1,90
22	Kembaran	0,10	0,20	0,10	0,20	0	0	0	0	0	0,10	0,20	0,30	1,20
23	Sokaraja	0,10	0,20	0,20	0,20	0	0	0	0	0	0,20	0,20	0,10	1,20
24	PWT Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	PWT Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	PWT Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	PWT Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	11,30	5,90	5,00	4,60	0	0	0	0	0	3,80	4,60	4,80	40,00

BUPATI BANYUMAS,


 ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN XV
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 2 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

No	Kecamatan	(ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Lumbir	0,50	1,00	0,50	0,50	0	0	0	0	0	0,50	1,00	0,50	4,50
2	Wangon	0,50	0,50	1,00	0,50	0	0	0	0	0	0,20	0,50	0,50	3,70
3	Jatilawang	0,50	0,50	0,50	0,30	0	0	0	0	0	0,30	0,50	0,60	3,20
4	Rawalo	0,50	0,50	0,50	0,50	0	0	0	0	0	0,30	0,50	0,50	3,30
5	Kebasen	0,50	1,00	0,50	0,40	0	0	0	0	0	0,50	1,00	0,40	4,30
6	Kemranjen	0,50	0,50	0,20	0,40	0	0	0	0	0	0,50	0,50	0,60	3,20
7	Sumpiuh	0,50	0,50	1,00	0,70	0	0	0	0	0	0,50	0,50	0,50	4,20
8	Tambak	0,50	0,50	0,30	0,30	0	0	0	0	0	0,30	0,50	0,50	2,90
9	Somagede	1,00	0,50	0,50	0,60	0	0	0	0	0	0,50	0,50	0,50	4,10
10	Kalibagor	1,00	0,50	0,60	0,30	0	0	0	0	0	0,40	0,30	0,50	3,60
11	Banyumas	1,00	0,50	0,50	0,30	0	0	0	0	0	0,50	0,50	0,50	3,80
12	Patikraja	1,00	0,50	0,50	0,50	0	0	0	0	0	0,40	0,40	0,70	4,00
13	Purwojati	1,00	1,00	0,30	0,40	0	0	0	0	0	0,40	0,30	0,50	3,90
14	Ajibarang	1,00	1,00	0,50	0,50	0	0	0	0	0	0,50	0,50	0,50	4,50
15	Gumelar	1,00	0,50	0,40	0,50	0	0	0	0	0	0,40	0,50	0,50	3,80
16	Pekuncen	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0	0	0	0	0,50	0,50	0,50	5,50
17	Cilongok	1,00	0,50	1,00	0,50	0	0	0	0	0	0,50	0,50	0,50	4,50
18	Karanglewas	1,00	1,00	1,00	0,30	0	0	0	0	0	0,50	0,50	0,50	4,80
19	Kedungbanteng	1,00	0,50	0,30	0,30	0	0	0	0	0	0,50	0,50	0,50	3,60
20	Baturraden	1,00	1,00	1,00	0,20	0	0	0	0	0	0,50	0,50	0,50	4,70
21	Sumbang	0,50	0,50	0,50	0,40	0	0	0	0	0	0,50	0,50	0,50	3,40
22	Kembaran	0,50	1,00	0,50	0,10	0	0	0	0	0	0,50	0,50	0,50	3,60
23	Sokaraja	0,50	0,50	0,20	0,20	0	0	0	0	0	0,50	0,50	0,50	2,90
24	PWT Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	PWT Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	PWT Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	PWT Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		17,5	15,5	13,3	9,7	0	0	0	0	0	10,2	12,0	11,8	90,00

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR **2** TAHUN 2016
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

No	Kecamatan	(Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Lumbir	0,10	0,10	0,10	0	0	0	0	0	0	0	0,10	0,10	0,50
2	Wangon	0,20	0,20	0,10	0	0	0	0	0	0	0	0,10	0,10	0,70
3	Jatilawang	0,10	0,10	0,10	0	0	0	0	0	0	0	0,10	0,10	0,50
4	Rawalo	0,10	0,20	0,10	0	0	0	0	0	0	0	0,10	0,10	0,60
5	Kebasen	0,30	0,20	0,10	0	0	0	0	0	0	0	0,10	0,10	0,80
6	Kemranjen	0,20	0,20	0,10	0	0	0	0	0	0	0	0,10	0,10	0,70
7	Sumpiuh	0,30	0,20	0,10	0	0	0	0	0	0	0	0,10	0,10	0,80
8	Tambak	0,30	0,20	0,10	0	0	0	0	0	0	0	0,10	0,30	1,00
9	Somagede	0,10	0,10	0,10	0	0	0	0	0	0	0	0,10	0,20	0,60
10	Kalibagor	0,10	0,20	0,10	0	0	0	0	0	0	0	0,10	0,10	0,60
11	Banyumas	0,30	0,20	0,10	0	0	0	0	0	0	0	0,10	0,10	0,80
12	Patikraja	0,20	0,20	0,10	0	0	0	0	0	0	0	0,10	0,10	0,70
13	Purwojati	0,20	0,30	0,10	0	0	0	0	0	0	0	0,10	0,10	0,80
14	Ajibarang	0,10	0,10	0,10	0	0	0	0	0	0	0	0,10	0,10	0,50
15	Gumelar	0,20	0,20	0,10	0	0	0	0	0	0	0	0,10	0,10	0,70
16	Pekuncen	0,10	0,10	0,10	0	0	0	0	0	0	0	0,10	0,10	0,50
17	Cilongok	0,20	0,30	0,10	0	0	0	0	0	0	0	0,10	0,10	0,80
18	Karanglewas	0,10	0,10	0,10	0	0	0	0	0	0	0	0,10	0,10	0,50
19	Kedungbanteng	0,20	0,20	0,20	0	0	0	0	0	0	0	0,10	0,10	0,80
20	Baturraden	0,10	0,10	0,20	0	0	0	0	0	0	0	0,10	0,10	0,60
21	Sumbang	0,20	0,20	0,20	0	0	0	0	0	0	0	0,10	0,10	0,80
22	Kembaran	0,10	0,20	-	0	0	0	0	0	0	0	0,10	0,10	0,50
23	Sokaraja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,10	0,10	0,20
24	PWT Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	PWT Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	PWT Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	PWT Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		3,80	3,90	2,40	-	-	-	-	-	-	-	2,30	2,60	15,00

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN XVII
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 2 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN
 DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

		(ton)												
	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sep	Okt	Nop	Des	Jumlah
1	Lumbir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wangon	0,69	0,65	0,57	0,51	0,55	0,30	0,24	0,24	0,54	0,60	0,66	0,66	6,21
3	Jatilawang	0,90	0,85	0,75	0,67	0,47	0,39	0,31	0,31	0,71	0,79	0,87	0,87	7,89
4	Rawalo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kebasen	0,05	0,04	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,40
6	Kemranjen	1,78	1,73	1,47	1,31	0,93	0,77	0,62	0,62	1,39	1,55	1,70	1,70	15,57
7	Sumpiuh	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,14
8	Tambak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Somagede	2,56	2,53	2,12	1,89	1,34	1,11	0,89	0,89	2,00	2,23	2,45	2,45	22,46
10	Kalibagor	0,34	0,32	0,28	0,25	0,18	0,15	0,12	0,12	0,26	0,29	0,32	0,32	2,95
11	Banyumas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Patikraja	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,03	0,27
13	Purwojati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ajibarang	0,25	0,25	0,20	0,18	0,13	0,11	0,09	0,09	0,19	0,21	0,23	0,23	2,16
15	Gumelar	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,14
16	Pekuncen	0,37	0,37	0,30	0,27	0,19	0,16	0,13	0,13	0,29	0,32	0,35	0,35	3,23
17	Cilongok	0,09	0,09	0,08	0,07	0,05	0,04	0,03	0,03	0,07	0,08	0,09	0,09	0,81
18	Karanglewas	6,49	6,00	5,36	4,79	3,28	2,82	2,26	2,26	5,08	5,64	6,20	6,20	56,38
19	Kedungbanteng	36,71	33,00	30,32	27,13	19,10	15,96	12,75	12,75	28,73	31,92	35,11	35,11	318,59
20	Baturraden	16,01	14,70	13,22	11,83	8,32	6,96	5,57	5,57	12,53	13,92	15,33	15,33	139,29
21	Sumbang	0,35	0,35	0,29	0,26	0,18	0,15	0,12	0,12	0,28	0,31	0,34	0,34	3,09
22	Kembaran	1,79	1,50	1,48	1,35	0,94	0,78	0,62	0,62	1,40	1,56	1,72	1,72	15,48
23	Sokaraja	0,30	0,30	0,27	0,25	0,17	0,14	0,11	0,11	0,25	0,28	0,31	0,31	2,80
24	Purwokerto Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Purwokerto Barat	0,05	0,05	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,41
26	Purwokerto Timur	0,05	0,05	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,41
27	Purwokerto Utara	0,15	0,15	0,12	0,11	0,07	0,07	0,05	0,05	0,12	0,13	0,15	0,15	1,32
	Jumlah	69,00	63,00	57,00	51,00	36,00	30,00	24,00	24,00	54,00	60,00	66,00	66,00	600,00

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN XIX
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 2 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN
 DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

														(ton)
	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sep	Okt	Nop	Des	Jumlah
1	Lumbir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wangon	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,10
3	Jatilawang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,11
4	Rawalo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kebasen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kemranjen	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,03	0,27
7	Sumpiuh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Tambak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Somagede	0,04	0,04	0,04	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,03	0,04	0,04	0,04	0,36
10	Kalibagor	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,05
11	Banyumas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Patikraja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Purwojati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ajibarang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Gumelar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Pekuncen	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,04
17	Cilongok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Karanglewas	0,10	0,10	0,10	0,09	0,06	0,05	0,03	0,05	0,09	0,09	0,10	0,10	0,96
19	Kedungbanteng	0,59	0,59	0,56	0,50	0,32	0,27	0,19	0,21	0,50	0,54	0,56	0,56	5,39
20	Baturraden	0,26	0,26	0,24	0,22	0,14	0,12	0,10	0,09	0,22	0,23	0,24	0,24	2,36
21	Sumbang	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,06
22	Kembaran	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,03	0,27
23	Sokaraja	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
24	Purwokerto Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Purwokerto Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Purwokerto Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Purwokerto Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1,10	1,10	1,05	0,90	0,60	0,50	0,35	0,40	0,90	1,00	1,05	1,05	10,00

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN XX
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR **2** TAHUN 2016
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN
 DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

(ton)

No.	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sep	Okt	Nop	Des	Jumlah
1	Lumbir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wangon	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03	0,30
3	Jatilawang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,02	0,02	0,01	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,39
4	Rawalo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kebasen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kemranjen	0,09	0,09	0,08	0,07	0,05	0,04	0,03	0,03	0,07	0,08	0,08	0,08	0,79
7	Sumpiuh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Tambak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Somagede	0,12	0,12	0,12	0,10	0,07	0,06	0,04	0,04	0,10	0,11	0,12	0,12	1,12
10	Kalibagor	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,17
11	Banyumas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Patikraja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Purwojati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ajibarang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,10
15	Gumelar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Pekuncen	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,17
17	Cilongok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Karanglewas	0,31	0,31	0,30	0,25	0,17	0,14	0,10	0,11	0,25	0,28	0,30	0,30	2,82
19	Kedungbanteng	1,75	1,75	1,68	1,43	0,96	0,80	0,56	0,64	1,43	1,60	1,68	1,69	15,97
20	Baturraden	0,77	0,77	0,73	0,65	0,42	0,33	0,24	0,28	0,65	0,70	0,73	0,73	7,00
21	Sumbang	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,18
22	Kembaran	0,09	0,09	0,08	0,07	0,04	0,04	0,03	0,03	0,07	0,08	0,08	0,08	0,78
23	Sokaraja	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,13
24	Purwokerto Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Purwokerto Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Purwokerto Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Purwokerto Utara	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,08
	Jumlah	3,30	3,30	3,15	2,70	1,80	1,50	1,05	1,20	2,70	3,00	3,15	3,16	30,00

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN XXI
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 2 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN
 DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

		(ton)												
	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sep	Okt	Nop	Des	Jumlah
1	Lumbir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wangon	0,07	0,07	0,06	0,05	0,04	0,02	0,02	0,02	0,05	0,07	0,07	0,07	0,61
3	Jatilawang	0,09	0,09	0,07	0,07	0,05	0,03	0,02	0,02	0,07	0,09	0,09	0,09	0,78
4	Rawalo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kebasen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kemranjen	0,18	0,17	0,15	0,14	0,09	0,06	0,05	0,05	0,14	0,17	0,18	0,18	1,56
7	Sumpiuh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Tambak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Somagede	0,26	0,24	0,21	0,20	0,13	0,09	0,07	0,07	0,20	0,24	0,26	0,26	2,23
10	Kalibagor	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03	0,29
11	Banyumas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Patikraja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Purwojati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ajibarang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,20
15	Gumelar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Pekuncen	0,04	0,04	0,03	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01	0,03	0,04	0,04	0,04	0,34
17	Cilongok	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,08
18	Karanglewas	0,65	0,62	0,54	0,51	0,34	0,23	0,17	0,17	0,51	0,62	0,65	0,65	5,66
19	Kedungbanteng	3,67	3,51	3,03	2,87	1,92	1,28	0,96	0,96	2,87	3,51	3,67	3,67	31,92
20	Baturraden	1,60	1,53	1,32	1,25	0,84	0,56	0,42	0,42	1,25	1,53	1,60	1,60	13,92
21	Sumbang	0,04	0,03	0,03	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03	0,04	0,04	0,32
22	Kembaran	0,18	0,17	0,15	0,14	0,09	0,06	0,05	0,05	0,14	0,17	0,18	0,18	1,56
23	Sokaraja	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03	0,29
24	Purwokerto Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Purwokerto Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Purwokerto Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Purwokerto Utara	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,24
	Jumlah	6,90	6,59	5,71	5,41	3,59	2,38	1,81	1,81	5,41	6,59	6,90	6,90	60,00

BUPATI BANYUMAS

ACHMAD HUSEIN